



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2020**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/342 / TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 - 2038;
 23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2020;
 24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2020 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan perubahan pagu anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 serta sebagai acuan dalam penentuan ketercapaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 19 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M.A. PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 1884 / 424 / TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020, maka perlu dilaksanakan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 serta sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 13 Agustus 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 1884 / 424 /TAHUN
2020

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

DAFTAR RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Bappeda
23. Bapenda
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan penyesuaian terhadap Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Pemalang pada Perubahan APBD Tahun 2020. Perumusan dan Perencanaan Perubahan Renja Tahun 2020 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2016 - 2021. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi satu satunya tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Perubahan Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Perubahan Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2016-2021. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2020 merupakan dasar untuk menyusun perubahan rencana kegiatan dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Pemalang, 14 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. M.A. HUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/ 342 / TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN RENJA BPKAD TAHUN 2020	ii
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1884/424/ TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKAD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang.....	28
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	48
3.1 Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020	48
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2020	15
Tabel 2.2 : Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	21
Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pematang	36
Tabel 3.1 : Matrik Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 Perubahan Tahun 2020	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2020 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Tanggal 24 Juni 2019 Nomor : 050/1063/Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD dapat dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diantaranya meliputi :

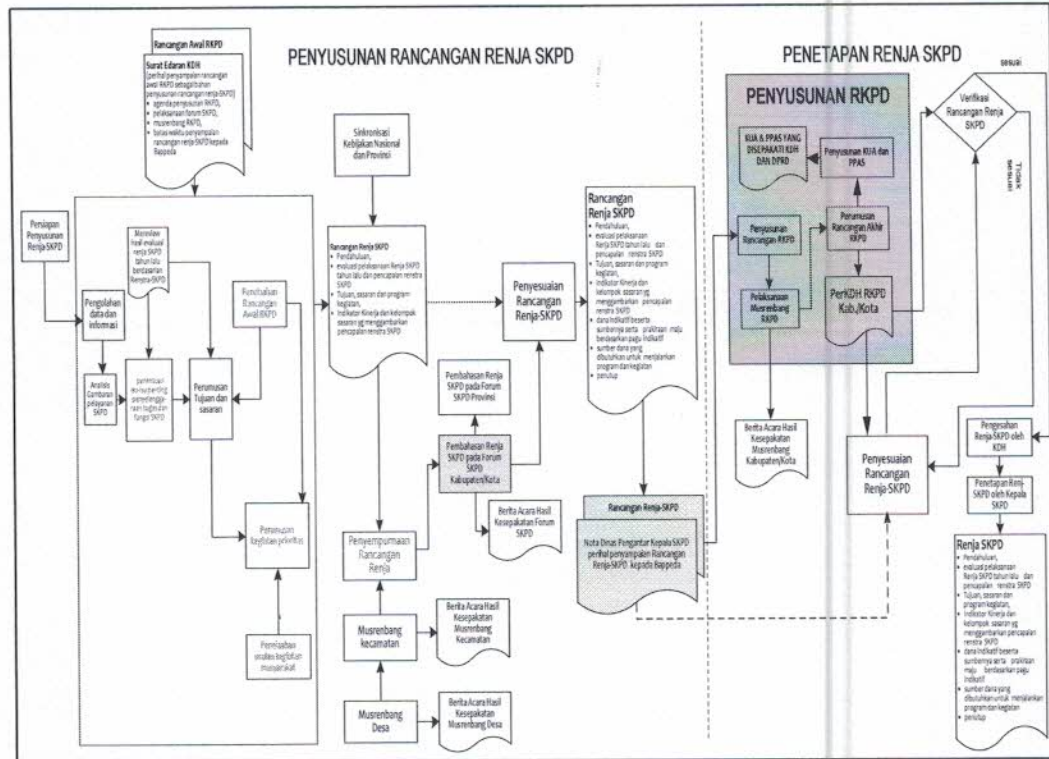
1. Adanya Pandemi *Corona Virus Disease- 2019 (Covid-19)* sehingga terdapat dinamika kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi makro.
2. Adanya Rasionalisasi anggaran yang mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 2020 Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dari hal tersebut diatas diperlukan adanya penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya, dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber gambar : Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penyampaian Perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2020, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan Visi

“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera” yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
 29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
 30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah :

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2020;
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang agar perubahan yang ada tidak melenceng dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Tahun 2020;
- b. Agar dapat mengakomodir perubahan rencana anggaran pada kegiatan yang mengalami perubahan anggaran;
- c. Mengakomodir kebutuhan yang krusial yang belum ditetapkan pada penetapan APBD Tahun 2020;
- d. Sebagai acuan bagi seluruh Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang karena memuat arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

- 3.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan atau kinerja suatu kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2020, dan hal tersebut juga dapat mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang menetapkan program pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang meliputi :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.800 surat/nota dinas;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 85 unit;
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target 53 unit;
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 20 SK, 24 Laporan
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan untuk 4 orang 12 bulan;
 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target 10 unit;

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 Paket, 30 Jenis;
9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan targetnya 3 Paket, 11 Jenis;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 12 kali kegiatan;
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 26 buah;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 kegiatan;
13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 4 jenis;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 2 jenis;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 11 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 0 unit;
2. Pengadaan Meubeleur dengan target 21 unit;
3. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 15 unit;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 52 unit;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 33 unit;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit;
9. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur dengan target 1 unit;
10. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 55 unit;
11. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan target 2 sistem/software.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 85 orang.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 1 Dokumen;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2 Dokumen;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 Laporan.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi dengan target 2 Dokumen.
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 1 LKD.
6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 24 laporan.
7. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan target 1 Dokumen.

V. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan target 10 Dokumen.

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 33 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan target 1 Perbup;
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 2 Perbup;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 1 Raperda;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan target 1 Perbup;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan target 1 Raperda;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target 1 Perbup;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 1 Raperda;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 1 Perbup;
9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 1 kegiatan;
10. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pematang dengan target 36 sertifikat, 96 papan identitas;
11. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 78 bidang;
12. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 3 kali kegiatan;
13. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 1 SK
14. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 2 laporan;
15. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;
16. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;
17. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 Perbup;
18. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 30 Laporan;
19. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 2 Laporan;
20. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 4 laporan;
21. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 2 laporan;
22. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 12 Laporan;

23. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan.
24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD, dengan target 3 unit;
25. Penerbitan SP2D belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan dengan target 5.000 Dokumen;
26. Penerbitan SP2D belanja tidak langsung dengan target 5.000 Dokumen;
27. Penyusunan Dokumen Penghentian pembayaran gaji PNSD dengan target 500 Dokumen;
28. Penyusunan Dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD dengan target 12.400 Dokumen;
29. Peningkatan kompetensi pengelola aset daerah dengan target 2 kegiatan;
30. Peningkatan dan Pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target 1 aplikasi;
31. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan LKT dengan target 4 Laporan;
32. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 24 Dokumen;
33. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas dengan target 3000 Dokumen SPD.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sampai dengan Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2020 dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

Tabel :2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2018 (n-2)		Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2018 (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Bidang Keuangan									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.500	22.500	7.700	7.700	100,00	8.000	38.200	83,96
		Terperluhunya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan								
		Terkirimnya surat masuk dan surat keluar (surat/notdin)								
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	8	4	4	100,00	4	16	66,67
		Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dan internet (bulan)								
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	880	415	155	154	99,35	185	754	85,68
		Terlaksananya jaminan kendaraan dinas/operasional (unit)								
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	223	64	32	32	100,00	53	149	66,82
		Tercapainya prosentase Jasa Pemeliharaan & perizinan Kendaraan dinas (unit)								
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Daerah	216	72	36	36	100,00	36	144	66,67
		Tersusunnya SK Bupati tentang PA, KPA, dan bendaharaan SKPD (Dokumen)								
		Tersusunnya Laporan Belanja Langsung BPKAD (laporan)								
		Terlaksananya publikasi informasi (kali)								
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
		Terlaksananya pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor (bulan)								
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50	20	10	10	100,00	10	40	80,00
		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Mesin Ketik, Mesin Fotocopy dll. (bulan)								
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
		Tersedianya rata-rata kebutuhan ATK (paket, buah)								

01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia rata - rata kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan (paket, buah/lembar)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (kali)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	548	308	85	85	100,00	83	474	86,50
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia koran, majalah dan buku perundang - undangan (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (jenis)	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
01	18	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Keluar daerah dengan kebutuhannya (jenis)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
01	21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat dan Laporan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi (Laporan)	100	40	20	20	100,00	20	80	80,00
01	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.(Laporan)	14.000	5.600	2.800	2.800	100,00	2.800	11.200	80,00
01	23	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Prosentase terselesaikannya penelitian dan penerbitan SP2D (SP2D)	40.000	14.500	10.000	10.000	100,00	11.000	35.500	88,75
01	24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana SKPD dan Anggaran Kas (Dokumen)	1.250	500	300	300	100,00	275	1.075	86,00
01	27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Tersusunnya SKPP dan SP2D Belanja Gaji SKPD (SKPP)	5.000	3.000	500	500	100,00	500	4.000	80,00
02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan								
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	80	28	52	52	100,00	0	80	100,00
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (unit, paket)	13	4	3	3	100,00	3	10	76,92
02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit)	35	2	12	10	83,33	17	29	82,86
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan komputer terhadap kebutuhan (unit)	50	13	25	25	100,00	9	47	94,00

02	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit gedung)	10	4	2	2	2	100,00	2	8	80,00
02	02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	5	2	1	1	1	100,00	1	4	80,00
02	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	180	64	32	32	32	100,00	52	148	82,22
02	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	150	66	33	33	33	100,00	33	132	88,00
02	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	2	1	1	1	100,00	1	4	80,00
02	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (paket)	5	2	1	1	1	100,00	1	4	80,00
02	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer & perlengkapannya (unit)	300	100	50	50	50	100,00	75	225	75,00
02	02	45	Pemeliharaan rutin / berkala software dan sistem informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan BMD yang dapat berjalan dengan baik (sistem,jaringan)	6	2	1	1	1	100,00	2	5	83,33
05	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN									
05	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi bagi ASN di BPKAD serta terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi (orang)	375	196	10	10	10	100,00	85	291	77,60
06	06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia									
06	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya LKJIP (Dokumen) Tersusunnya PK dan RKT (Dokumen)	80	30	15	15	15	100,00	17	62	77,50
06	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	4	2	2	2	100,00	2	8	80,00
06	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (Dokumen)	95	35	20	20	20	100,00	20	75	83,33
06	06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Tersusunnya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen,laporan)	60	28	14	14	14	100,00	14	56	93,33

06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen)	291	144	138	138	100,00	3	285	97,94
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan realisasi pendapatan dan belanja hasil rekonsiliasi SKPD & PPKD (laporan)	144	48	24	24	100,00	48	120	83,33
06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya RTP Tersusunnya Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assessment Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Tersusunnya buku kumpulan tindak lanjut LHP BPK RI	57	0	0	0	100,00	19	38	66,67
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA BPKAD dan PPKD termasuk pengeserannya Tersusunnya Rensira dan Renja BPKAD beserta perubahannya (Dokumen)	65	26	13	13	100,00	13	52	80,00
15	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	- Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD - Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD - Ketepatan Waktu Penyampaian LKD kepada BPK - Ketepatan Waktu Pencairan Dana - Pemanfaatan Aset Daerah	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
15	03	Penyusunan kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Buku SSH Tahun 2020 dan perubahan SSH Tahun 2019 (Dokumen) Tersusunnya perbup tentang kebijakan akuntansi Pemda (dokumen) Tersusunnya buku saku ringkasan perbup tentang kebijakan akuntansi pemda (dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
15	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2019 (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	Tersusunnya perda tentang APBD (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

15	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Tersusunnya perda tentang Perubahan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	1	1	100,00	1	4	80,00
15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	1	1	100,00	1	4	80,00
15	10	Penyusunan rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5	2	1	1	1	1	100,00	1	4	80,00
15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban APBD (Dokumen)	5	2	1	1	1	1	100,00	1	4	80,00
15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya bintek tentang pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	5	2	1	1	1	1	100,00	1	4	80,00
15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terselenggaranya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pematang (sertifikat) Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik Pemkab pematang dan dalam kondisi baik (papan)	750	300	142	142	142	140	100,00	140	582	77,60
15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya Dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD (Dokumen)	62.000	24.800	12.400	12.400	12.400	12.400	100,00	12.400	49.600	80,00
15	21	Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Terbayarnya PBB tanah milik pemda (bidang)	620	300	150	67	67	78	44,67	78	445	71,77
15	22	Retribusi Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya distribusi BMD (kali)	20	8	3	2	2	4	66,67	4	16	80,00
15	23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKB dan RKPBU	Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah Tersusunnya SK Pengurus barang & perubahannya Tersusunnya RKBMD dan RKPMD Tahun (Dokumen)	25	10	5	5	5	5	100,00	5	20	80,00
15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD Semesteran Tersusunnya Laporan rekonsiliasi BMD (Laporan)	20	4	2	2	2	4	100,00	4	10	50,00
15	25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD (Laporan)	10	4	2	2	2	2	100,00	2	8	80,00
15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD (Laporan)	84	48	12	12	12	12	100,00	12	72	85,71
15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen)	5	2	1	1	1	3	100,00	3	4	80,00

15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah (Laporan)	500	200	100	100	100,00	100	400	80,00
15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah (Laporan)	19	7	4	4	100,00	4	15	78,95
15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Terlaksananya kegiatan bimtek dan pendampingan dalam rangka peningkatan kompetensi pengurus barang (kali)	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00
15	56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/BMD	Tersusunnya Laporan Hasil pemantauan pemanfaatan aset (Laporan)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD konsolidasi	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil koordinasi tentang pengelolaan kas daerah Tersusunnya laporan mutasi deposito (Laporan)	120	48	24	24	100,00	24	84	70,00
15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya laporan bahan rancangan KUA PPAS selama satu tahun (laporan)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00

Tabel 2.2

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPKAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		PAGU		REALISASI sampai dengan TW II			INSTANSI
			RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	PAGU	%	Fisik (%)	
			12 bulan	12 bulan	7.669.408.000	2.400.000.000	2.038.756.492	26.58	40.92	
1	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan									
4.04	Keuangan									
4.04 . 4.04.08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
4.04 . 4.04.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	12 bulan	2.400.000.000	1.413.400.000	413.298.756	17.22	33.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materi dan pengiriman dokumen	7800 surat/notdin	7800 surat/notdin	30.000.000	21.000.000	3.102.000	10.34	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4 Jenis	Rekening/ bulan	660.000.000	660.000.000	229.837.196	34.82	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah BMD yang diarsansikan	85 unit	5 unit	830.000.000	50.000.000	0	0.00	3.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berjin	53 unit	53 unit	17.500.000	17.500.000	4.877.025	27.87	45.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara dan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS SMP dan SD yang tersusun selama setahun	20 SK	20 SK	85.000.000	42.400.000	10.581.000	12.45	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	4 orang	4 orang	55.000.000	75.000.000	30.758.676	55.92	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	10 unit	10 unit	10.000.000	8.000.000	2.820.000	28.20	20.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.04 . 4.04.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibeli	30 Jenis	30 Jenis	90.000.000	80.000.000	12.240.000	13.60	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam setahun	11 jenis	11 jenis	50.000.000	50.000.000	2.450.000	4.90	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	12 kegiatan	12 kegiatan	7.500.000	7.500.000	3.014.000	40.19	30.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dalam setahun	26 buah	27 buah	25.000.000	26.250.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dalam setahun	12 kegiatan	12 kegiatan	15.000.000	15.000.000	4.950.000	33.00	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia dalam setahun	4 jenis	4 jenis	115.000.000	118.000.000	39.486.750	34.34	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah jenis perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka rapat rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah	2 jenis	2 jenis	410.000.000	242.750.000	69.182.109	16.87	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	12 bulan	1.032.000.000	950.000.000	272.731.155	26.43	34.38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	0 0	0 0	32.000.000	0	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jenis dan jumlah meubeleur yang dibeli	21 unit	1 unit	40.000.000	10.000.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya yang terlaksana selama setahun	15 unit	15 unit	200.000.000	262.500.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokal gedung yang dipelihara	2 lokal	2 lokal	500.000.000	500.000.000	217.320.900	43.46	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	50.000.000	37.000.000	12.512.541	25.03	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	52 unit	52 unit	120.000.000	88.000.000	29.612.714	24.68	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	33 unit	33 unit	20.000.000	25.000.000	4.650.000	23.25	45.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.04 . 4.04.08 . 02 . 28					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit Genset	1 unit Genset	15.000.000	5.000.000	950.000	6.33	25.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 29					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0	1 unit	5.000.000	5.000.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 30					Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perengkapannya	Jumlah komputer dan perengkapannya yang terpelihara selama setahun	30 unit	55 unit	20.000.000	17.500.000	7.685.000	38.43	35.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 02 . 45					Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah aplikasi (software) yang terpelihara selama setahun	0	2 Software	30.000.000	0	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 05					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	80 %	80 %	290.700.500	104.500.000	47.625.241	16.38	5.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 05 . 02					Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta seminar/sosialisasi/bimek/orkshop dalam rangka meningkatkan kompetensi yang terkirim	10 orang	85 orang	290.700.500	104.700.500	47.625.241	16.38	5.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06					Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja yang tersedia	80 %	80 %	290.000.000	133.100.000	31.290.150	10.79	70.34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 01					Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1.500.000	1.500.000	60.00	100.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 02					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan BPKAD Semester I Tahun 2020 dan Prognosisnya yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	500.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 04					penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan BPKAD Akhir Tahun 2019 yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	3.100.000	510.000	8.50	100.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 05					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Semester I Tahun 2020 Konsolidasi dan prognosisnya yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	44.000.000	29.000.000	0	0.00	0.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 07					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Tahun 2019 Konsolidasi yang tersusun	1 LKD	1 LKD	156.000.000	66.000.000	23.434.650	15.02	100.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 08					Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan SKPD dan SKPKD (hasil rekonsiliasi bulanan) yang tersusun	24 Laporan	24 Laporan	75.000.000	30.000.000	4.845.500	6.46	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 06 . 09					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk Kegiatan TA 2021 yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	1.000.000	20.00	40.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 09					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Jumlah dokumen perencanaan dan	80 %	80 %	17.000.000	17.000.000	4.025.000	23.68	45.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	keuangan	penganggaran yang tersedia																Daerah
4.04 . 4.04.08 . 09 . 02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen		17.000.000	17.000.000	4.025.000	23.68	45.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK terhadap LKD	100% , (WTP = 100%)	100% , (WTP = 100%)		3.639.707.500	3.828.784.500	1.269.786.190	34.89	48.50								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi Pemda yang tersusun	1 Perbup	1 Perbup		45.000.000	35.000.000	0	0.00	0.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2021 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang tersusun	2 Perbup	2 Perbup		159.000.000	124.000.000	2.771.250	1.74	15.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Raperda tentang APBD Tahun 2021 beserta lampirannya yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda		200.000.000	181.000.000	92.988.684	46.49	15.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 beserta Lampirannya yang tersusun	1 Perbup	1 Perbup		81.000.000	67.000.000	49.730.545	61.40	15.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 beserta Lampirannya yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda		200.000.000	168.000.000	23.203.500	11.60	10.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 beserta lampirannya yang tersusun	1 Perbup	1 Perbup		75.000.000	70.000.000	3.138.000	4.18	10.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 beserta lampirannya yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda		240.000.000	210.000.000	0	0.00	100.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 beserta Lampirannya yang tersusun	1 Perbup	1 Perbup		65.000.000	65.000.000	0	0.00	100.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04 . 4.04.08 . 15 . 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan	Jumlah kegiatan Bimtek tentang Pengelolaan	1 kegiatan	1 kegiatan		135.000.000	80.000.000	0	0.00	0.00								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

																		Daerah
4.04.4.04.08.15.16		keuangan daerah		Keuangan Daerah kepada Perangkat Daerah yang terlaksana	36 sertifikat	36 sertifikat	215.000.000	984.077.000	87.746.520	40.81	70.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.21		Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang		Jumlah sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang yang terproses	78 Bidang	78 Bidang	38.000.000	38.000.000	0	0.00	0.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.22		Pembayaran PBB aset daerah / Barang milik daerah		Jumlah tanah milik Pemkab Pemalang yang terbayar PBB nya	3 kegiatan	3 kegiatan	5.000.000	0	0	0.00	0.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.23		Pendistribusian barang milik daerah		Jumlah kegiatan pendistribusian BMD ke SKPD selama setahun	1 SK	1 SK	60.000.000	35.000.000	1.937.500	3.23	50.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.24		Penetapan status penggunaan BMD, SK pengurusan barang RKBU dan RKPBU		Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Pengguna BMD yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	.0	0	0.00	0.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.25		Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah		Jumlah Laporan BMD Semester I dan II Tahun 2020 yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	62.000.000	42.000.000	810.000	1.31	0.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.26		Penetapan status penggunaan BMD, SK pengurusan barang RKBU dan RKPBU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemindahanganan dan Penghapusan BMD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	0	0	0.00	50.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.31		Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD yang tersusun	1 Perbup	1 Perbup	40.000.000	0	0	0.00	0.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.35		Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah		Jumlah Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Penda yang tersusun	30 Laporan	30 Laporan	59.000.000	45.405.000	17.195.100	29.14	10.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.54		Peningkatan kapasitas aparaturnya pengelola keuangan daerah		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	35.000.000	3.015.690	6.03	10.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.56		Pemantauan, pemanfaatan aset/Barang milik daerah		Jumlah laporan hasil pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah	4 Laporan	4 Laporan	69.800.000	109.800.000	24.428.574	35.00	40.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.57		Pengelolaan kerugian daerah		Jumlah Laporan Hasil pemantauan dan pemanfaatan BMD	2 Laporan	2 Laporan	165.000.000	90.000.000	14.438.000	8.75	20.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.58		Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)		Jumlah Laporan BMD Semester I Tahun 2020	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	30.000.000	6.789.500	10.45	50.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.59		Pengelolaan kas daerah		Jumlah Laporan Mutasi Deposito yang tersusun selama Tahun 2020	2 Laporan	2 Laporan	70.000.000	46.595.000	10.321.500	14.75	25.00							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.59		Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS		Jumlah Laporan bahan Rancangan KUA, perubahan anggaran dan PPAS yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan												Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.04.4.04.08.15.62					Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPKD	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4 untuk SKPD	3 unit	3 unit	840.000.000	810.000.000	808.000.000	96.19	100.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.64					Penerbitan SP2D belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan	Jumlah SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang diterbitkan	5000 Dokumen	5000 Dokumen	85.000.000	65.000.000	9.965.470	11.72	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.65					Penerbitan SP2D belanja langsung	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan	5000 Dokumen	5000 Dokumen	75.000.000	60.000.000	2.977.000	3.97	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.66					Penyusunan dokumen penghentian pembayaran gaji PNSD	Jumlah dokumen penghentian Pembayaran Gaji PNSD (SKPP)	500 Dokumen	500 Dokumen	15.000.000	15.000.000	3.153.000	21.02	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.67					Penyusunan dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	Jumlah Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	12400 Dokumen	12400 Dokumen	90.907.500	80.907.500	67.164.957	73.88	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.68					Peningkatan kompetensi pengelola aset daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi/Bintek kepada pengelola aset pada perangkat daerah yang terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan	170.000.000	100.000.000	16.000.000	9.41	10.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.69					Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah aplikasi yang tersusun dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	150.000.000	190.000.000	9.274.000	6.18	15.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.70					Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan LKT	Jumlah Laporan Realisasi Perimanan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	7.000.000	675.000	2.25	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.71					Penyusunan Laporan Realisasi Perimanan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Realisasi Perimanan PPKD dan Laporan Realisasi Perimanan Pembiayaan yang tersusun	24 Dokumen	24 Dokumen	50.000.000	15.000.000	8.400.000	16.80	50.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.08.15.72					Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Jumlah Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana bagi Perangkat Daerah yang tersusun	300 Dokumen SPD	300 Dokumen SPD	30.000.000	30.000.000	5.662.400	18.87	35.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.2.038.756.492,00 dari anggaran sebesar Rp. 7.669.408.000,00 atau 26.58 %. Terdapat 51 kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 50 %,dengan penjelasan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Capaian target pada program baru terealisasi 17.22 %. Dari 14 kegiatan hanya 1 (satu) kegiatan yang capaiannya diatas 50 %, yakni kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar 55.92 %. Dan 13 kegiatan lainnya berkisar antara 0 sampai dengan 40.19%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian target pada program baru terealisasi 26.43 %. Dari 11 kegiatan semuanya masih berada dibawah 50 %. Salah satu penyebabnya karena anggaran pada kegiatan tersebut dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian target pada program baru terealisasi sebesar 16.38 %. Dalam program tersebut hanya memuat 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dimana anggaran untuk kegiatan tersebut masuk dalam rasionalisasi anggaran, mengingat kegiatan sosialisasi juga masih belum bisa dilaksanakan akibat adanya Pandemi Covid- 19.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian untuk program tersebut sebesar 10.79 %, dimana dari 7 kegiatan yang ada hanya 1 kegiatan yang mencapai target diatas 50 % yaitu kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN) sebesar 60 %. Sementara kegiatan lainnya baru akan dilaksanakan pada semester berikutnya sehingga masih belum bisa mencapai target sebagaimana mestinya.

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Capaian target dalam program baru sebesar 23.68 %. Dalam program tersebut hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang mencapai target sebesar 23.68 %.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian target dari program tersebut sudah mencapai target sebesar 34.89 %. Dimana dari 33 kegiatan yang ada,, hanya ada 3 kegiatan yang mencapai target lebih dari 50 %, dan 30 kegiatan yang belum mencapai target 50 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyiapkan dan menyusun Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran;
2. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.
3. Menyiapkan petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyiapkan Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
6. Menyiapkan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;

9. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pemalang;
10. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pemalang;
11. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
12. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;
13. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
14. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
15. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
16. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
17. Menyusun Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;
18. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
19. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
20. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
21. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pemalang melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
23. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
24. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;

25. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
26. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
27. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kassesuai ketentuan yang berlaku;
28. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
29. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pemalang beserta tunjangan kinerjanya;
30. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
31. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
32. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
33. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
34. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
35. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD.

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. PAD

1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

1.2. Lain-Lain PAD yang Sah

1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

1.2.2. Penerimaan Jasa Giro

- 1.2.3. Penerimaan Bunga
- 1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah
- 1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
- 1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
- 1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian
- 1.2.8. Penerimaan Lain-Lain
- 1.2.9. Pendapatan Sewa
- 2. Dana Perimbangan
 - 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2.1.1. Bagi Hasil Pajak
 - 2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
 - 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 2.3. Dana Alokasi Khusus
 - 2.3.1. DAK Fisik
 - 2.3.2. DAK Non Fisik
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
 - 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
 - 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
 - 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang. Adapun IKU BPKAD Kabupaten Pematang yaitu :

- 1. Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 penyampaian Raperda APBD ke DPRD

dilaksanakan paling lambat Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Sedangkan penyampaian Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan pada pasal 172 ayat 1 Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan pada Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan. Kategori ketercapaian indikator ini adalah 100% apabila tepat waktu, 50% apabila tidak tepat waktu dan 0% apabila tidak disampaikan.

IKU BPKAD ini didukung oleh 2 indikator program yaitu :

a. Ketepatan waktu penyampaian RKA-SKPD

Penyusunan RKA/RKAP oleh SKPD merupakan bagian dari penyusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah menyusun RKA/RKAP sesuai dengan ketentuan penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan mendorong tercapainya target kinerja dari IKU BPKAD yang pertama.

b. Ketepatan waktu penyusunan SPD

Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat waktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran kas yang telah ditetapkan. Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dientry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. SP2D yang diterbitkan tepat waktu.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang diproses dalam waktu 3 hari sejak dibuatnya SPM SKPD dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD. Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka penerbitan SP2D dapat dilaksanakan sesuai ketentuan (3 hari). Target dari IKU ini adalah 100% (tepat waktu atau 3 hari). IKU SP2D yang diterbitkan tepat waktu didukung oleh satu indikator program yaitu Ketepatan Waktu Pencairan Dana. Indikator Program Ketepatan Waktu pencairan dana

diukur dengan membandingkan jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan ditransfer dananya ke rekening penerima dibanding dengan jumlah berkas usulan pencairan dana dari SKPD dalam satu tahun anggaran.

3. Pemanfaatan Aset Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

b. Pemindahtanganan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

c. Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. IKU BPKAD ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pemalang yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu). Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

4. Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan Pasal 298 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya. IKU ini didukung satu Indikator Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester Pertama. Laporan Keuangan semesteran paling lambat disusun pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 291 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. BPKAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD sesuai target aau 100% (tepat waktu).

5. Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK RI di atur pada Pasal 297 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 296 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Laporan Keuangan Daerah disusun paling lambat bulan Maret Tahun berikutnya. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2019 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang telah mencapai WTP

sebanyak 3 tahun berturut turut yaitu WTP atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2016, LKD Tahun 2017 dan LKD Tahun 2018. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Program	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)	100%	Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D (3 hari sesuai SOP)	100%	Pencairan Dana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Pemanfaatan aset daerah. (Jumlah aset daerah yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan)	90%	Pengamanan Aset	60%	60%	60%	60%	50%	55%	60%	60%	60%		
			Pemindahtanganan Aset	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
			Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD (bulan Juni tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK (bulan Maret tahun berikutnya)	100%	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam

pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :

- Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media masa (surat kabar) dan Website BPKAD (pemalangkab.go.id/bpkad)
- Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pemalang.
- Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
- Mempublikasikan pencairan SP2D realtime yang dapat dilihat melalui monitor display yang diletakkan di luar kantor BPKAD dan melalui website BPKAD.

Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasipengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.

2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses serifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Dalam hal

inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 khususnya ketentuan tentang kodifikasi barang daerah. BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.
 - Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
 - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.
 - Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai aplikasi pendukung penyajian data aset daerah.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line. BPKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :
- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.

- BPKAD menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran maupun realisasi di ruang computer BPKAD. Peningkatan fasilitas tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan spesifikasi yang cukup.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pematang;
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya

anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proposional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD yang belum terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam tiga tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017 dan 2018. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Pematang Jaya Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan visi ini, BPKAD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjatidiri, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerah lain tetapi pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal ini sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan BPKAD selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sewa aset berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain itu, BPKAD mengelola pendapatan yang masuk dalam pendapatan BPKAD selaku PPKD yaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro pemegang kas, jasa giro kas daerah dan pendapatan bunga deposito atas cash idle di RKUD Kabupaten Pematang Jaya.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD yang sah yang dikelola BPKAD selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh BPKAD selaku PPKD secara keseluruhan pengaruhnya tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pematang Jaya, tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan.

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan

meningkatkan kinerja BPKAD dalam mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum yang memadai merupakan peran BPKAD dalam turut andil mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan secara profesional dan optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut.

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2019 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal karena faktor kurangnya SDM, sehingga perolehan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam memberikan pelayanan.

3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN diBPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

3.1. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020

Adapun Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
dan Perubahan Tahun 2020

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Anggaran Perubahan 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan							
4.04	Keuangan							
4.04 . 4.04.08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			7.669.408.000				6.446.985.000
4.04 . 4.04.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	BPKAD	12 bulan	2.400.000.000			1.413.400.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	BPKAD	7800 surat/ notdin	30.00000000	APBD		21.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	BPKAD	4 jenis	660.000.000	APBD		660.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah BMD yang diasuransikan	BPKAD	85 unit	830.000.000	APBD		50.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berjalin	BPKAD	53 unit	17.500.000	APBD		17.500.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara dan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS SMP dan SD yang tersusun selama setahun	BPKAD	20 SK	85.000.000	APBD		42.4000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	BPKAD	4 orang	55.000.000	APBD		75.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	BPKAD	10 unit	10.000.000	APBD		8.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibeli	BPKAD	30 Jenis	90.000.000	APBD		80.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam setahun	BPKAD	11 jenis	50.000.00	APBD		50.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	BPKAD	12 kegiatan	7.500.000	APBD		7.500.000
4.04 . 4.04.08 . 01 .13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia dalam setahun	BPKAD	26 buah	25.000.000	APBD		26.250.000

4.04 . 4.04.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dalam setahun	BPKAD	12 kegiatan	APBD	15.000.000	12 kegiatan	15.000.000	15.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia dalam setahun	BPKAD	4 jenis	APBD	115.000.000	4 jenis	115.000.000	118.000.000
4.04 . 4.04.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah jenis perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka rapat rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah	BPKAD	2 jenis	APBD	410.000.000	2 jenis	410.000.000	242.750.000
4.04 . 4.04.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperutnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	BPKAD	12 bulan	APBD	1.032.000.000	12 bulan	1.032.000.000	950.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	BPKAD	0	APBD	32.000.000	0	32.000.000	0
4.04 . 4.04.08 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jenis dan jumlah meubeleur yang dibeli	BPKAD	21 unit	APBD	40.000.000	1 unit	40.000.000	10.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya yang terlaksana selama setahun	BPKAD	15 unit	APBD	200.000.000	15 unit	200.000.000	262.500.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah lokal gedung yang dipelihara	BPKAD	2 lokal	APBD	500.000.000	2 lokal	500.000.000	500.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas jabatan yang dipelihara	BPKAD	1 unit	APBD	50.000.000	1 unit	50.000.000	37.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPKAD	52 unit	APBD	120.000.000	52 unit	120.000.000	88.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	BPKAD	33 unit	APBD	20.000.000	33 unit	20.000.000	25.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	BPKAD	1 unit Genset	APBD	15.000.000	1 unit Genset	15.000.000	5.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	BPKAD	1 unit	APBD	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpelihara selama setahun	BPKAD	55 unit	APBD	20.000.000	30 unit	20.000.000	17.500.000
4.04 . 4.04.08 . 02 . 45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Jumlah aplikasi (software) yang terpelihara selama setahun	BPKAD	2 software	APBD	30.000.000	0	30.000.000	0
4.04 . 4.04.08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	BPKAD	80 %	APBD	290.700.500	80 %	290.700.500	104.700.500
4.04 . 4.04.08 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta seminar/ sosialisasi/ bimtek/workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi yang terkirim	BPKAD	85 orang	APBD	290.700.500	10 orang	290.700.500	104.700.500
4.04 . 4.04.08 . 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	BPKAD	80 %	APBD	290.000.000	80 %	290.000.000	133.100.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) BPKAD yang tersusun	BPKAD	1 Dokumen	APBD	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1.500.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan BPKAD Semester I Tahun 2020 dan Prognosisnya yang tersusun	BPKAD	2 Dokumen	APBD	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000	500.000

4.04 . 4.04.08 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan BPKAD Akhir Tahun 2019 yang tersusun	BPKAD	1 Laporan	6.000.000	APBD		1 Laporan	3.100.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 05	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Semester I Tahun 2020 Konsolidasi dan prognosisnya yang tersusun	BPKAD	2 Dokumen	44.000.000	APBD		2 Dokumen	29.000.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 07	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Tahun 2019 Konsolidasi yang tersusun	BPKAD	1 LKD	156.000.000	APBD		1 LKD	66.000.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan SKPD dan SKPKD (hasil rekonsiliasi bulanan) yang tersusun	BPKAD	24 Laporan	75.000.000	APBD		24 Laporan	30.000.000
4.04 . 4.04.08 . 06 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk Kegiatan TA 2021 yang tersusun	BPKAD	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	3.000.000
4.04 . 4.04.08 . 09	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	BPKAD	80 %	17.000.000	APBD		80 %	17.000.000
4.04 . 4.04.08 . 09 . 02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun	BPKAD	10 Dokumen	17.000.000	APBD		10 Dokumen	17.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK terhadap LKD	BPKAD	100% , (WTP = 100%)	3.639.707.500	APBD		100% , (WTP = 100%)	3.828.784.500
4.04 . 4.04.08 . 15 . 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi Pemda yang tersusun	BPKAD	1 Perbup	45.000.000	APBD		1 Perbup	35.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2021 dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang tersusun	BPKAD	2 Perbup	159.000.000	APBD		2 Perbup	124.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Raperda tentang APBD Tahun 2021 beserta lampirannya yang tersusun	BPKAD	1 Raperda	200.000.000	APBD		1 Raperda	181.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 beserta Lampirannya yang tersusun	BPKAD	1 Perbup	81.000.000	APBD		1 Perbup	67.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2020 beserta Lampirannya yang tersusun	BPKAD	1 Raperda	200.000.000	APBD		1 Raperda	168.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 beserta lampirannya yang tersusun	BPKAD	1 Perbup	75.000.000	APBD		1 Perbup	70.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 beserta lampirannya yang tersusun	BPKAD	1 Raperda	240.000.000	APBD		1 Raperda	210.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BPKAD	1 Perbup	65.000.000	APBD		1 Perbup	65.000.000

4.04.4.04.08.15.15																		1 kegiatan	135.000.000	APBD			1 kegiatan	80.000.000
4.04.4.04.08.15.16																				APBD			340 sertifikat	984.077.000
4.04.4.04.08.15.21																				APBD			78 Bidang	38.000.000
4.04.4.04.08.15.22																				APBD			3 kegiatan	0
4.04.4.04.08.15.23																				APBD			1 SK	35.000.000
4.04.4.04.08.15.24																				APBD			2 Laporan	.0
4.04.4.04.08.15.25																				APBD			2 Laporan	42.000.000
4.04.4.04.08.15.26																				APBD			12 Laporan	0
4.04.4.04.08.15.31																				APBD			1 Perbup	0
4.04.4.04.08.15.35																				APBD			30 Laporan	45.405.000
4.04.4.04.08.15.54																				APBD			2 Laporan	35.000.000
4.04.4.04.08.15.56																				APBD			4 Laporan	109.800.000
4.04.4.04.08.15.57																				APBD			2 Laporan	90.000.000
4.04.4.04.08.15.58																				APBD			12 Laporan	30.000.000
4.04.4.04.08.15.59																				APBD			2 Laporan	46.595.000
4.04.4.04.08.15.62																				APBD			3 unit	810.000.000
4.04.4.04.08.15.64																				APBD			5000 Dokumen	65.000.000
4.04.4.04.08.15.65																				APBD			5000 Dokumen	60.000.000
4.04.4.04.08.15.66																				APBD			500 Dokumen	15.000.000

4.04 . 4.04.08 . 15 . 67				Penyusunan dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	Jumlah Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	BPKAD	12400 Dokumen	90.907.500	APBD	12400 Dokumen	80.907.500
4.04 . 4.04.08 . 15 . 68				Peningkatan kompetensi pengelola aset daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi/Bintek kepada pengelola aset pada perangkat daerah yang terlaksana	BPKAD	2 kegiatan	170.000.000	APBD	2 kegiatan	100.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 69				Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah aplikasi yang tersusun dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	BPKAD	1 aplikasi	150.000.000	APBD	1 aplikasi	190.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 70				Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan LKT	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	BPKAD	4 Laporan	30.000.000	APBD	4 Laporan	7.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 71				Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang tersusun	BPKAD	24 Dokumen	50.000.000	APBD	24 Dokumen	15.000.000
4.04 . 4.04.08 . 15 . 72				Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Jumlah Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana bagi Perangkat Daerah yang tersusun	BPKAD	300 Dokumen SPD	30.000.000	APBD	300 Dokumen SPD	30.000.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2016 -2021.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan langkah- langkah dalam penyesuaian terhadap kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dan mengakomodir kegiatan krusial sebagai bentuk dalam salah satu upaya untuk menangani bencana Pandemi Covid -19 yang terjadi di Kabupaten Pemalang.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja tahun berjalan dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra maupun SAKIP.

Dengan adanya penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020, diharapkan BPKAD lebih maksimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2016-2021 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Pemalang, 14 Agustus 2020

Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang



Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002